

Prospek Regionalisme Timur-Tengah Pasca-Arab Spring: Telaah terhadap Identitas Kolektif Liga Arab

Ziyad Falahi

Abstract

Several large demonstrations have taken place all over the world in recent years, especially arab spring is a revolutionary wave of protests, and wars occurring in the middle east that. Therefore, this paper try to elaborate the prospect of regionalism in Middle-east after Arab Spring occured. Some academicians believed that the dramatical transition of political regime in middle east can be enable a more deeper integration of arab league than before. But along to the history, the integration of Arab league always restraint because of the absence of collective identity. Indeed, one of the most important thing to determine regionalism is collective identity. Collective identity can't be easily constructed when the member still have a misperception among the others. On the other hand, the transformation of global economics push the appearance of south south cooperation. This condition could be push a economic cooperation among arab league members as a first step in institutionalization process.

Keyword: *Collective Identity, Arab league, Arab Spring, Regionalism, and South-South Cooperation.*

Pendahuluan

Berbicara mengenai prospek integrasi regionalisme timur tengah senantiasa dihadapkan pada perdebatan antara pihak yang optimis dan pesimis. Negara Timur-Tengah hingga kini masih disibukkan dengan problem keamanan dan kedaulatan yang tidak kunjung tuntas dan semakin kompleks dengan kehadiran para aktor eksternal. Turbulensi konflik dalam kawasan ini secara tidak langsung menghambat kerjasama ekonomi. Implikasinya wilayah Timur-Tengah belum tertular oleh maraknya gejala *free trade area* (FTA) dan pasar bersama di berbagai wilayah lain seperti ASEAN, Uni Eropa, Mercosur, NAFTA, dan lain-lain, sekalipun minyak merupakan komoditas yang sangat potensial, sehingga wajar jika organisasi regional yang masih eksis dalam wilayah timur hanyalah Liga Arab dengan segala problematiknya.

Liga Arab menjadi contoh regionalisme di wilayah Timur-Tengah yang menarik untuk disimak lebih lanjut seiring perubahan peta politik tahun 2011. Perpolitikan Timur-Tengah dihiasi oleh serangkaian pergantian rezim

yang terjadi dalam tempo yang cepat. Beberapa nama besar seperti Husni Mubarak, Muammar Qadhafi, dan Ben Ali yang tersohor karena langgengnya kekuasaan mereka akhirnya tidak kuasa membendung gelora kudeta dari rakyatnya. Tentu pergolakan besar tersebut memancing para akademisi untuk mengelaborasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam Liga Arab yang tidak bisa menolak keterlibatannya dalam serangkaian krisis tersebut.

Kaum yang optimis memandang jika pergantian rezim kontemporer melalui gerakan revolusi bertajuk *Arab Spring* yang dimulai 18 Desember 2010 sebagai prospek yang baik bagi pembentukan regionalisme Timur-Tengah. Hal tersebut karena transisi pemerintahan dari otoriter ke demokrasi akan membuat sikap negara-negara Arab untuk lebih moderat. Sebaliknya, pihak yang pesimis mengasumsikan pergantian rezim menjadi pertanda buruk, karena ketidakstabilan politik tidak akan normal dalam tempo waktu yang singkat, sehingga akan mengganggu intensitas kerjasama yang terjadi. Instabilitas yang semakin diperumit oleh munculnya negara-negara lainya yang turut mengintervensi. Menelaah regionalisasi di kawasan ini menjadi lebih menarik saat kita menyimak bahwa fenomena pergantian rezim politik yang masif terjadi di beberapa negara Timur-Tengah. Diantara dualisme perdebatan tersebut, tulisan ini hendak mengelaborasi kembali pertanyaan tentang apakah pergolakan pergantian rezim yang terjadi akhir-akhir ini dapat mendorong regionalisme Liga Arab ke arah yang lebih terintegrasi atau malah justru sebaliknya?.

Guna terciptanya koherensi gagasan dalam penulisan, maka sistematika secara umum akan dibagi dalam tujuh pembahasan. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan sistematika penulisan. Bagian kedua lebih pada suatu tinjauan teoritik yang melihat bagaimana identitas memainkan peranan krusial dalam proses intergrasi kawasan. Bagian ketiga merupakan analisa dalam melihat sejarah kerjasama regional dalam Liga Arab dan bagaimana faktor identitas berperan didalamnya. Bagian keempat melihat bagaimana prospek kerjasama ekonomi antar-anggota Liga Arab. Pembahasan kelima akan meninjau implikasi *people power* dan kemungkinan alternatif terhadap perkembangan sistem ekonomi dunia yang terjadi. Bagian keenam akan mengelaborasi kemungkinan kerjasama selatan-selatan dalam proses integrasi Liga Arab. Sedangkan Bab terakhir merupakan kesimpulan.

Analisis Identitas Kolektif dalam Regionalisme:

Sebuah Tinjauan Teoritik

Model integrasi kawasan pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua model, yakni berbentuk intergovernmentalisme atau supranasionalisme (Hurrel 2008: 56-90). Dalam konsep intergovernmentalisme, negara-negara yang bergabung tidaklah diperuntukkan untuk mendirikan supra-kedaulatan

yang membawahi negara anggotanya. Dalam konsep supranasionalisme terjadi proses integrasi yang lebih dalam yang secara gradual akan membentuk rezim yang lebih tinggi, di mana para negara anggota secara sukarela tunduk pada entitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain konsep intergovernmentalisme bernuansa neorealis, sedangkan supranasionalisme lebih ke arah paradigma neoliberal. Seperti kita ketahui paradigma realis dalam hubungan internasional menyikapi regionalisme sebagai suatu kerjasama yang rapuh karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Sebaliknya, kaum liberal berkeyakinan bahwa kondisi global kontemporer tidak memungkinkan suatu negara untuk mengatasi problem sendiri, sehingga regionalisme telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan (Nye dan Keohane 2005: 23-36).

Namun satu aspek yang acapkali dilupakan kaum neoliberal dan neorealis dalam pembentukan supranasionalisme ialah kesadaran identitas regional (*regional identity awareness*). Alexander Wendt (2007) mewakili kaum konstruktivis mencoba melihat gagalnya suatu institusi regional karena setiap anggota masih diliputi oleh dilema keamanan. Wendt (1987: 78-90) mengasumsikan adanya dua fase dalam melihat proses terintegrasinya sebuah institusi regional, yakni *vertikal linkage* dan *horizontal linkage*. Sebelum berekspansi secara horizontal, baik perluasan bidang maupun perluasan keanggotaan, setiap institusi regional harus terlebih dahulu menanamkan benih-benih persatuan dalam internal mereka secara vertikal. Identitas menjadi kajian analisis yang penting karena persepsi atas diri (*self*) dan liyan (*others*) memungkinkan menghambat proses pendalaman vertikal (*vertikal linkage*) (Wendt, 1987). Analisis tersebut dapat menjelaskan mengapa ASEAN yang telah berhasil berkespansi secara horizontal dalam ARF ternyata masih menyisakan problem pendalaman vertikal.

Dalam ranah studi hubungan internasional (HI), analisa identitas nasional dan budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran identitas regional (*regional identity awareness*) hingga kini belum memnemukan ruang pembahasan serius. Nilai-nilai kultural selama ini cenderung menjadi kajian yang terpinggirkan dalam trayektori teori HI, terutama pada era Perang Dingin yang disebabkan lantaran begitu kuatnya pendekatan sistemik neorealis dan *complex interdependence* ala liberal. Regionalisme acapkali dipandang sebagai dampak dari perubahan sistem internasional yang membuat negara tidak lagi *self centric*. Sebelum pendekatan sistemik, pendekatan *rational choice* negara-bangsa mendominasi pijakan analisis untuk menggambarkan perilaku egosentris negara, sehingga regionalisme belum sepenuhnya dikaji pada masa tersebut.

Pemikiran mengenai identitas baru mulai berkembang pasca-Perang Dingin yang menjadi awal kemunculan pemikiran konstruktivisme. Tinjauan teori mengenai identitas ala konstruktivisme sesungguhnya diadopsi dari

disiplin ilmu sosiologi, yaitu adalah teori tentang konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial memediasi antara pendekatan agen dan struktur yang acapkali parsial dalam menganalisa fenomena sosial. Dengan kata lain, Anthony Giddens (2003, 1984: 88) menyebutnya sebagai dualitas agen-struktur. Kata dualitas di sini mengandaikan bahwa perilaku agen secara historis turut mengkonstitusi norma-norma yang kemudian menjadi struktur non-material. Kaum konstruktivis tidak mengabaikan eksistensi struktur, namun menyatakan bahwa struktur tidak lagi bersifat mengekang, melainkan memungkinkan adanya transformasi identitas secara diskontinuitas. Dalam tinjauan teori regionalisme, Uni Eropa dengan segala problematikanya hingga sekarang masih menjadi model terbaik dan diasumsikan sudah mapan untuk membentuk regionalisme (Onuf, 2007).

Identitas kolektif bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan senantiasa berproses mengikuti perkembangan. Identitas menurut Alexander Wendt (1999: 78) merupakan pemahaman mengenai peran dari diri sendiri dan harapan-harapan yang ditujukan kepada diri sendiri. Wendt juga berpendapat bahwa identitas memberikan gambaran mengenai motivasi dan perilaku dari suatu aktor. Identitas nasional sering dikaitkan dengan pertanyaan "siapa kita?", "apa yang kita lakukan?", dan "siapa mereka?". Identitas nasional dibentuk melalui proses antagonisme antara "kita" dan "mereka". Kesamaan nilai-nilai dalam suatu masyarakat akan membedakannya dengan masyarakat lainnya, dan dengan itu membentuk identitas nasional dari suatu bangsa. Identitas nasional akan muncul dari perasaan adanya nasib yang sama dan masa depan yang sama. Identitas nasional ini seringkali muncul sebagai faktor penting ketika sebuah negara-bangsa mengalami perubahan sistem secara drastis. Di saat terjadi perubahan besar inilah, pertanyaan-pertanyaan mengenai "siapa kita?" dan "apa yang kita lakukan?".

Namun perlu ditekankan bahwa negara dengan kultur yang koheren belum tentu memiliki koherensi identitas. Bahkan beberapa negara yang relatif koheren secara budaya justru acapkali lebih memilih berkompetisi ketimbang kerjasama. Liga Arab sendiri merupakan basis kultur sekte Islam-Sunni yang mana hingga kini masih dihadapkan pada problem segregasi identitas. Contoh lain dapat disaksikan melalui bagaimana perseteruan dua etnis melayu antara Indonesia dan Malaysia dan bagaimana konflik yang langgeng antara Korea Utara dan Korea Selatan yang seolah menihilkan aspek kultural. Realitas ini menunjukkan mengenai perlunya membedakan antara nilai kultural dan identitas dengan lebih menganalisa ulang problem kesejarahan hubungan antar negara secara partikular, sebagai aspek yang mengkonstitusi identitas (Neack, 2007: 45).

Sejarah Regionalisme Timur-Tengah:

Problem Ambivalensi Identitas dalam Liga Arab

Tujuan dibentuknya Liga Arab sejak tahun 1945 sesungguhnya sangat berkaitan dengan kerjasama di bidang ekonomi. Namun dalam implementasinya variabel-variabel politik memainkan peranan krusial dalam dinamika Liga Arab selanjutnya. Kita dapat melihat bagaimana Krisis Suez tahun 1967 dan perang Yom Kippur tahun 1973 menunjukkan bagaimana sengketa politik dalam wilayah Timur-Tengah sangat mempengaruhi konstelasi ekonomi politik internasional seiring naiknya harga minyak dunia atau fakta di mana Mesir yang diberhentikan dari keanggotaan Liga Arab tahun 1979 karena menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Oleh karena itulah adalah sangat parsial bagi kita jika hendak menganalisa prospek regionalisme kawasan Timur-Tengah hanya dari sudut pandang analisa ekonomi semata (Kohlberg, 1999 : 89).

Oleh karena itulah, konsep regionalisme yang presisi untuk meninjau Liga Arab bukanlah regionalisme atas dasar geografis semata, tetapi lebih pada faktor kultural dan identitas. Oleh karena itulah teori integrasi dengan sudut pandang geografis seperti yang diungkapkan teori regionalisme kontemporer sejatinya sulit diaplikasikan untuk menganalisa kasus Liga Arab. Hal tersebut karena Liga Arab tidak hanya dianggotai oleh negara yang berasal dari satu kawasan benua saja. Kompleksitas yang semakin bertambah seiring dengan masuknya beberapa negara Afrika Utara seperti Djibouti dan Komoro membuat konsepsi Liga Arab lebih bernuansa kultural. Analisa identitas juga sekiranya dapat menjelaskan alasan tidak masuknya Iran dalam Liga Arab yang sesungguhnya banyak dilatarbelakangi oleh ketidakcocokan etnis Persia dan ideologi syiahnya. Dalam konteks Liga Arab, intergovernmentalisme adalah konsep yang sesuai mengingat proses pembentukan aturan bersama yang dihambat oleh kepentingan nasional masing-masing negara anggota.

Ambivalensi identitas regional sesungguhnya merupakan turunan dari problem domestik wilayah Timur-Tengah yang acapkali dihadapkan pada problem mengenai *nation building* dan *state building*. Pasca-kolonial menjadi langkah awal yang membuat negara-negara Arab mayoritas menghadapi problematika *state building* dan *nation building*. Pembagian wilayah penjajahan atas dasar *Syces-Pycot Agreement* yang dilakukan tahun 1930-an tidak memperhatikan adanya perbedaan kultural yang ada, sehingga wajar jika dalam suatu negara yang multi etnis seperti halnya Lebanon, Irak, dan Yordania acapkali mengalami problem konflik sektarian yang melibatkan Sunni-Syiah-Kurdi. Liga Arab hingga sekarang hanya beranggotakan negara-negara berpaham Sunni, sehingga Liga Arab senantiasa akan terhambat dalam mencapai konsensus ketika beberapa negara anggotanya yang meskipun

berpemerintah Sunni, tapi memiliki basis Syiah yang banyak seperti halnya Lebanon dan Irak (Lippmann, 1999).

Kentalnya nuansa sentimen kultural inilah yang menyebabkan masalah politik seolah menjadi dominan dalam Liga Arab ketimbang ekonomi. Semangat kerjasama ekonomi yang melandasi raja Mesir Al-Faruk mendirikan Liga Arab pada tahun 1945 sesungguhnya kurang didasari atas pertimbangan sentimen ideologis tersebut. Sepanjang sejarahnya dilema keamanan begitu dapat dirasakan di wilayah Timur-Tengah sebagai sebuah wilayah yang diwarnai oleh wacana konflik dan peperangan. Belum lagi baku tembak yang terjadi di belahan negara tertentu menjadi ancaman bagi kedaulatan negara Timur-Tengah lainnya, semisal manifesto Gamal Abdul Nasser yang memicu perang besar Yom Kippur tahun 1973 yang melibatkan hampir seluruh negara di Timur-Tengah. Kita juga bisa melihat perang yang tak kunjung usai antara Israel-Palestina yang secara tidak langsung berdampak bagi para negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Syria. Belum lagi pertentangan antar sekte keagamaan semakin membuat rumit konstelasi politik internasional di Timur-Tengah.

Untuk semakin memperkuat analisis mengenai identitas dan pengaruhnya terhadap regionalisme Timur-Tengah, Liga Arab perlu untuk dikomparasi dengan GCC. Dari sini terlihat jika Liga Arab sesungguhnya memiliki tingkat kompleksitas budaya yang lebih ketimbang kerjasama dengan Teluk (GCC). Jika didasarkan apada analisa identitas, kerjasama negara teluk dengan adanya kultur yang relatif koheren dengan spirit Islam sunni, terbukti lebih mudah dalam terinstitusionalisasi (<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15011390,00.html>, 3 September 2012). Bukti kontemporer dapat kita lihat ketika para pemimpin Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk (GCC) sepakat terhadap pakta penyatuan mata uang. Kesepakatan itu diputuskan dalam pertemuan dua hari yang berlangsung 14 desember 2009 di Kuwait yang dipimpin oleh Raja Abdullah dari Saudi Arabia. Para gubernur bank negara-negara Teluk segera menjadwalkan pembentukan bank sentral GCC untuk mengeluarkan mata uang bersama. Lebih lanjut pada tahun 2010 didirikanlah Dewan Moneter GCC yang berada di bawah naungan bank sentral. Beberapa negara seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Saudi Arabia telah menandatangani dan meratifikasi pakta ini, sementara dua anggota GCC, Oman dan Uni Emirat Arab hingga kini masih belum memberikan kepastian (www.voanews.com, 20 juni 2012).

Tidak berhenti pada masalah perekonomian, bahkan GCC secara lebih terinstitusionalisasi sanggup untuk mengintervensi kedaulatan anggotanya. Sebagai contoh, para menteri luar negeri dari enam negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang mensponsori kesepakatan bertemu di Riyadh untuk membahas krisis Yaman pada April 2011. Kelompok menteri ini mengatakan pentingnya mengirim Sekjen GCC, Abdel Latif al-Zayyani, kembali ke

Yaman dan berharap untuk menghapus semua rintangan yang menghalangi kesepakatan akhir dengan presiden Yaman terkait pengunduran diri. Perjanjian ini diharapkan dapat memudahkan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatan, setelah pemimpin yang telah lama berkuasa menolak menandatangani perjanjian, bahkan lantaran kurang stabilnya perpolitikan Yaman, membuat rencana keanggotaan Yaman di GCC tahun 2015 semakin sulit terealisasi. Terlepas dari segala problematikanya, GCC terbukti lebih solid ketimbang Liga Arab dikarenakan tidak ada permasalahan kultural.

Setelah meninjau ulang sejarah regionalisme Liga Arab, menjadi wajar kiranya jika teori David Mittrany mengenai *spillover* menjadi kurang relevan. Kerjasama ekonomi yang diasumsikan menjadi pintu masuk *spillover* dalam integrasi nyatanya masih terpinggirkan oleh masalah keamanan. Tidak dapat dipungkiri, stagnasi dalam upaya pencarian identitas merupakan salah satu alasan mengapa regionalisme Timur-Tengah menjadi kurang terintegrasi, meskipun secara komoditas cenderung komplemen.

Prospek Kerjasama Ekonomi sebagai Determinan Regionalisasi Liga Arab

Tahun 2011 menjadi tahun yang bersejarah bagi sebagian besar negara di kawasan timur-tengah. Dalam waktu yang tidak berselang lama setelah Zine Al-Abidine Ben Ali di Tunisia mundur pada 14 Januari, rakyat Mesir yang selama lebih dari tiga dekade berada di bawah rezim Husni Mubarak berhasil melakukan kudeta pada 11 Februari. Berselang beberapa minggu tepatnya pada awal April, presiden Yaman Ali Abdullah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kepemimpinannya. Begitu pula dengan proses kudeta terhadap presiden Muammar Qadhafi di Libya yang mengarah pada hasil serupa.

Memandang beberapa pergantian rezim, maka Liga Arab melakukan beberapa upaya untuk mengkonsolidasikan kembali antara kepentingan regional yang tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal. Kasus Libya membuat Liga Arab kali ini tidak berdiam diri sebagaimana yang pernah dilakukannya terhadap Perang Teluk. Liga Arab kali ini mengambil posisi moderat dalam partisipasinya terhadap kasus Libya. Pada satu sisi Liga Arab menyatakan dukungan terhadap penggulingan Muammar Qadhafi yang diasumsikan tidak terlegitimasi. Liga Arab bahkan secara serentak melakukan larangan zona udara di wilayah Libya. Akan tetapi, di sisi lain, Liga Arab sangat mengecam aksi militer yang dilakukan NATO untuk menintervensi kedaulatan Lybia. Tewasnya Qadhafi juga mempengaruhi dalam banyak hal perkembangan Liga Arab lantaran Qadhafi merupakan tokoh Liga Arab (www.bbc.co.uk, 4 september 2012).

Respon Liga Arab terhadap pergantian rezim negara anggotanya ternyata masih bersifat normatif dan tidak menunjukkan intervensi yang kuat. Terlebih lagi, soliditas integrasi Liga Arab kembali diuji saat diskursus bulan Mei 2011 mulai menyoroti pidato Barack Obama. Secara mengejutkan, Obama mendorong agar perbatasan Palestina dikembalikan sebelum perjanjian 1967. Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahkan menekankan bahwa Liga Arab harus mengadakan konferensi sebagai respon atas kejadian ini, apalagi dengan tekanan negara-negara lain agar Palestina diakui kemerdekaannya tak ayal isu politik Palestina menjadikan menarik untuk menduga manuver apa yang akan dilakukan Liga Arab di bawah mandat Al-Araby mantan menlu Mesir yang baru terpilih menjadi sekjen di bulan Mei ini menggantikan Amir Moussa.

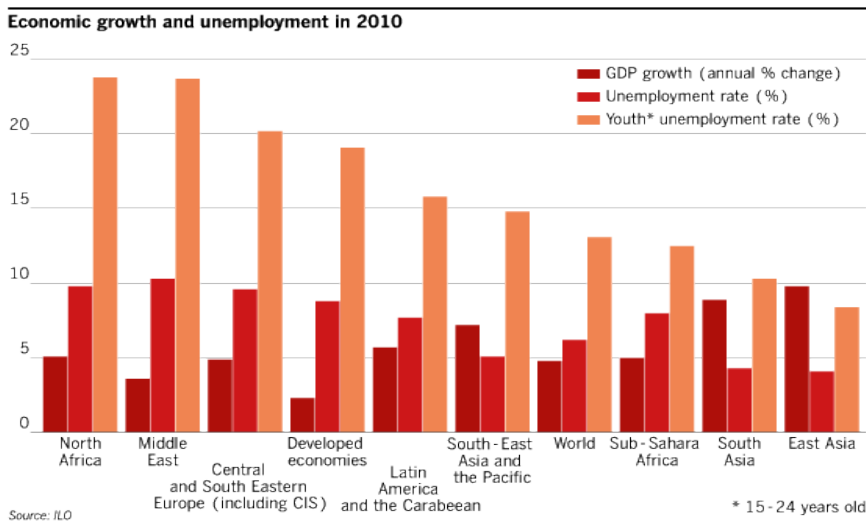
Ada argumentasi yang menyatakan bahwa adanya kesamaan komoditas, yakni minyak menjadi alasan sulitnya Liga Arab untuk terintegrasi secara vertikal. Jika dikembalikan ke asumsi David Mittrany, maka memang salah satu prasyarat terintegrasinya wilayah adalah komoditas yang berbeda namun saling melengkapi sebagaimana Uni Eropa dan AFTA. Namun dalam konteks Timur-Tengah, Kerjasama negara Teluk (GCC) menunjukkan bahwa kesamaan komoditas minyak antara keenam anggotanya justru dapat menghasilkan integrasi yang sangat mapan. Sementara itu, Liga Arab yang sumber daya alamnya seharusnya komplemen antar anggota hingga kini belum menemukan pakem integrasi sebagaimana GCC. Padahal jika dijabarkan, komoditas perekonomian antara negara Liga Arab sesungguhnya bervariasi dan sangat memungkinkan untuk komplemen ketimbang GCC. Seperti diketahui, negara anggota Liga Arab terutama di kawasan Teluk memiliki sumber daya alam yang amat besar diantaranya minyak dan gas alam. Beberapa negara anggota Liga Arab memiliki tanah yang subur, terutama di bagian Sudan. Beberapa kawasan, seperti daerah Mesir, Lebanon, Tunisia, dan Yordania juga merupakan negara anggota Liga Arab yang memiliki kawasan industri.

Selama ini, KTT Liga Arab sekalipun didesain untuk membawa isu ekonomi, namun acapkali lebih berpretensi membahas ranah politik. Faktanya kental dalam nuansa KTT ekonomi pertama Liga Arab di Kuwait tahun 2009 yang ternyata dihangatkan dengan isu akan dikeluarkannya konsensus untuk membela Palestina dalam kasus Gaza. KTT ekonomi pertama Liga Arab yang dihadiri oleh 22 negara Arab yang diselenggarakan di Doha pada 16 Januari 2009 tersebut lebih membahas penyerangan Zionis Israel terhadap Gaza dan hanya sedikit membahas krisis moneter dunia, serta beberapa masalah ekonomi, sosial, dan keuangan. KTT tersebut lebih dimaksudkan untuk mengaktifkan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh para pemimpin Arab dan negara Islam pada KTT Darurat Gaza sebelumnya. (www.iannnews.com, 4 September 2012). Hanya satu saja KTT yang secara murni membahas

tentang ekonomi ialah KTT ekonomi Liga Arab tanggal 19 januari 2011. Hasil pertemuan menyepakati untuk mengumpulkan dana sekitar US\$2 miliar untuk membantu usaha kelas menengah dan kecil di wilayah Timur-Tengah dan Afrika Utara. Usaha kelas menengah menjadi isu ekonomi yang penting karena pengangguran di negara Afrika Utara dan Timur-Tengah merupakan yang tertinggi di dunia seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1.

Perbandingan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Tahun 2010.



Sumber: International Labour Organization, 2010.

Problem mengenai Tabel 1.1 sudah seharusnya menjadi refleksi negara-negara Timur-Tengah untuk terkonsentrasi memperbaiki ketimbang bersikeras mempertahankan sentimen etnisitas. Di antara negara-negara Arab sendiri kerjasama ekonomi yang paling terkait dengan masalah pengangguran sebagaimana yang disebutkan pada tabel 1.1 tersebut ialah pembentukan *Islamic Development Bank*. Sebelumnya, Liga Arab juga mendirikan lembaga bantuan, yaitu *Arab Economic League* untuk membantu negara anggotanya yang sangat membutuhkan seperti Sudan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, Liga Arab berperan besar dalam menyusun kurikulum sekolah negara-negara Arab, melestarikan dokumen-dokumen dan hasil kebudayaan kuno, dan menerapkan teknologi modern dalam berbagai bidang dan menciptakan persatuan telekomunikasi regional.

Sentimen kultural itu membuat Liga Arab hingga kini masih tebang pilih dengan tidak memasukkan Iran atas dasar Syiah. Sentimen Syiah merupakan

alasan kultural yang lebih argumentatif ketimbang faktor etnis Persia. Jika persia yang dianggap bukan termasuk Liga Arab, faktanya Komoro dan Djibouti dapat menjadi anggota. Dalam studi hubungan internasional, selama ini kajian mengenai ketegangan negara-negara Arab dan Iran seringkali dikaji dalam paradigma yang lebih melihat faktor politik tingkat tinggi. Seiring dengan perkembangan, kajian yang semula pinggiran, yaitu identitas, menjadi penting sebagai analisa lebih lanjut.

Peminggiran Iran dalam konteks kerjasama ekonomi merupakan paradoks, lantaran Iran di masa Ahmaddinnejad berulang kali mengeluarkan proposal pembentukan pasar bersama (*common market*). Pada tahun 2010, Mahmoud Ahmaddinnejad, Presiden Iran mengikuti Sidang KTT Dewan Kerja Sama Teluk Persia di Doha. Dalam pidatonya, Ahmaddinnejad menyampaikan proposal terkait kerja sama kolektif sekaligus menyampaikan ide dibentuknya pasar bersama. Penolakan tersebut lebih karena permasalahan identitas kultural, padahal *common market* tersebut secara perhitungan ekonomis akan sangat mendorong pertumbuhan masing-masing negara anggota Liga Arab. Bahkan Perkembangan terbaru melaporkan bahwa Arab Saudi telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat senilai enam puluh miliar dollar dalam pembelian senjata. Bahkan pembelian senjata tersebut mencatat nominal yang terbesar dalam sejarah kedua negara dan salah satu transaksi senjata terbesar di dunia. Disinyalir pembelian senjata tersebut adalah sebagai respon Saudi terhadap nuklir Iran.

Transformasi Sistem Ekonomi Global dan *People Power* di Timur-Tengah

Joseph Stiglitz (2008) menggambarkan tatanan perekonomian dunia kontemporer pasca-krisis global 2008 sebagai "*freefall*". Setelah neoliberalisme dengan prinsip kebebasannya selama lebih dari tiga puluh tahun menghiasi struktur internasional dan selalu bisa bangkit sekalipun acapkali ditimpa krisis, maka Stiglitz (2008) meyakini jikalau hantaman keras krisis 2008 telah mengakhiri era neoliberalisme. Selain itu, Robert Jackson dan George Sorensen (2008: 34) menekankan bahwa perekonomian global kontemporer sedang memasuki era eksek neoliberalisme pasca terjadinya krisis 2008. Dikatakan sebagai sebuah eksek karena periode ini ditandai oleh kecenderungan mulai pudarnya kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar.

Kejatuhan neoliberal diperkuat oleh fakta ketika AS yang dalam sejarahnya paling lantang menyuarakan anti intervensi negara, ternyata malah mengeluarkan *baillout* untuk memperbaiki perekonomiannya pasca-krisis. Sebaliknya, negara-negara kini mulai melirik Cina sebagai contoh kesuksesan, padahal kebijakan ekonomi Cina yang banyak mengandalkan campur tangan negara merupakan model yang kontradiktif dengan asumsi

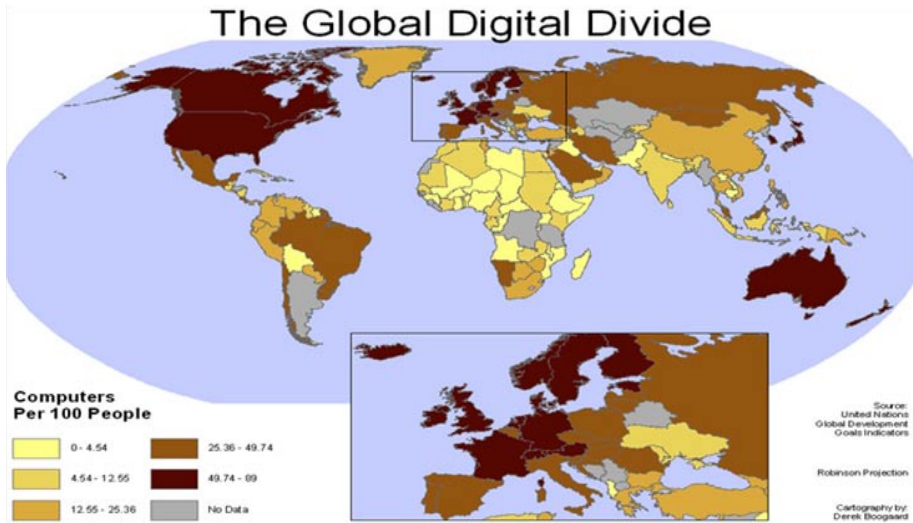
neoliberal yang tertuang dalam konsensus Washington. Dalam keyakinan kritikus neoliberal, kondisi global pasca krisis 2008 membuat institusi regional lebih terbuka (*inclusive*), sehingga diharapkan sentimen-sentimen kultural tidak lagi menjadi halangan. Ada secercah harapan bagi Liga Arab untuk mulai memanfaatkan struktur global yang sedang bertransformasi Pasca krisis 2008.

Kekuatan rakyat (*people power*) di Timur-Tengah menjadi contoh kasus yang menunjukkan adanya aspirasi dari masyarakat untuk merubah sistem ekonomi pasar bebas tersebut. Namun yang menjadi problem adalah negara yang diharapkan mampu menjadi institusi dalam mengatur pasar bebas ternyata seingkali tidak stabil. Sepanjang sejarahnya, Timur-Tengah menjadi bukti adanya hubungan MNC yang intensif bersinergi dengan kekuasaan otoriter, sehingga banyak yang pesimis sistem neoliberalisme sebagai rezim bisa diakhiri melalui *people power*. Gerakan sosial tersebut justru dibutuhkan demi metamorfosa kapitalisme seiring dengan adanya rencana investasi asing ke wilayah Timur-Tengah. Keterkaitan antara neoliberal dan gerakan sosial tersebut berdampak pada proses demokrasi dan *good governance*. Pemikiran neoliberal memberikan preskripsi mengenai urgensi munculnya institusi demokratis di mana masyarakat secara aktif dilibatkan dalam artikulasi pemerintahan, sehingga wajar jika Bank Dunia dan IMF acapkali membiayai proyek demokratisasi dan *good governance* sekalipun mendapat pertentangan yang keras di Timur-Tengah.

Pandangan liberal berkeyakinan bahwa intensitas *people power* muncul karena didorong oleh kemajuan informasi dan media, sehingga muncul sebuah pertanyaan besar terutama jika dibandingkan dengan kasus Timur-Tengah. Terdapat sebuah anomali karena Timur-Tengah dengan kemajuan informasi yang masih belum berkembang justru masif dalam melakukan gerakan sosial. Sebaliknya, negara-negara Asia Timur dengan perkembangan informasi yang lebih masif, namun ternyata kurang intensif terjadinya gerakan sosial. Bahkan Cina dengan tingkat perkembangan informasi tertinggi di Asia malah menjadi contoh sebaliknya di mana perkembangan informasi yang pesat tak kuasa mengurangi dominasi negara yang luar biasa dalam merepresi gerakan sosial. Dengan kata lain, isu kesenjangan teknologi (*digital divide*) dan demokrasi yang dikemukakan tidak sepenuhnya tepat.

Gambar 1.1.

Tabel Perbandingan Perkembangan Informasi antar Negara



Sumber: Internet World Stats, 2010

Sudah menjadi pemberitaan umum bahwa tahun 2011 adalah tahun keemasan gerakan sosial. Tidak terhitung banyak sekali gerakan sosial yang terjadi di penjuru dunia pada tahun 2011, mulai yang paling fenomenal, yakni *Arab Spring* di Timur-Tengah yang berhasil mengkuadeta rezim otoriter di negaranya, kemudian dilanjutkan dengan gerakan sosial berbasis perekonomian global di mana diwarnai dengan kemunculan gerakan bernama *occupy* sebagai respon atas kondisi paska krisis 2008. Gerakan *occupy* merupakan gerakan transnasional yang terjadi di banyak negara yang terpengaruh oleh gerakan *occupy Wall Street* di New York.

Namun gerakan rakyat yang fenomenal mengiringi tahun 2011 bisa jadi menjadi sebuah paradoks. Sebuah gerakan yang mengatasnamakan perlawanan terhadap neoliberalisme, namun menggunakan instrumen neoliberalisme, yakni media massa dan informasi. Gerakan *occupy* menjadi sangat bergantung pada sektor informasi karena tidak adanya basis ide transenden yang jelas dimiliki. Implikasinya, banyak gerakan yang dinilai hanya sekedar ikut-ikutan, bahkan dalam perkembangannya *occupy* malah semakin memperluas agendanya, sehingga kurang fokus pada isu kesejahteraan. Setelah itu muncullah sebuah wacana yang perlu dipikirkan kembali dalam fenomena gerakan *occupy* tahun 2011. Siapakah yang sesungguhnya resisten: gerakan *occupy* yang resisten terhadap neoliberal, ataukah sebaliknya, neoliberal yang resisten terhadap *occupy*.

Probabilitas Kerjasama Selatan-Selatan sebagai Pendorong Regionalisme Timur-Tengah

Konstelasi ekonomi politik Internasional kembali dimarakkan oleh kebangkitan kerjasama Selatan-Selatan. Fakta tersebut didukung oleh munculnya kekuatan perekonomian baru, yakni Brazil, Russia, India, dan China (BRIC), sehingga membuka kembali wacana mengenai perlunya menghidupkan kembali kerjasama selatan-selatan (*south-south cooperation*). Sebagaimana pernyataan Ernesto Laclau dan Chantall Moufee yang menunjuk beberapa negara Amerika Selatan seperti Venezuela dan Bolivia yang diasumsikan berhasil mengembalikan lagi semangat kerjasama selatan yang sempat terbengkalai. Dalam skala regional, refleksi kerjasama ini dicontohkan oleh kehadiran Mercosur di Amerika latin, dan ASEAN. Akan tetapi, nyatanya kerjasama Selatan-Selatan kontemporer lebih inklusif dalam mengimplementasikan diplomasi resistensinya, tidak seperti halnya kerjasama Selatan-Selatan yang menutup diri dari dialognya terhadap Utara. Model resistensi dalam kerjasama Selatan-Selatan terbukti setengah hati karena ternyata masih mengharapkan ada kesepakatan dengan negara Utara untuk dapat memberi stimulus. Oleh karena itulah, kerjasama Selatan-Selatan sangat didorong oleh logika interdependensi yang tentu berbalik dengan logika dependensi yang senantiasa dipakai negara Amerika Latin tahun 1960-1970-an. Kerjasama selatan-selatan sangat mengedepankan sektor industrilisasi dan investasi, padahal dalam alam pikir dependensia sebagaimana Andre Gunder Frank sebutkan, industrilisasi dan investasi asing akan senantiasa menyerap sumber daya alam negara Selatan.

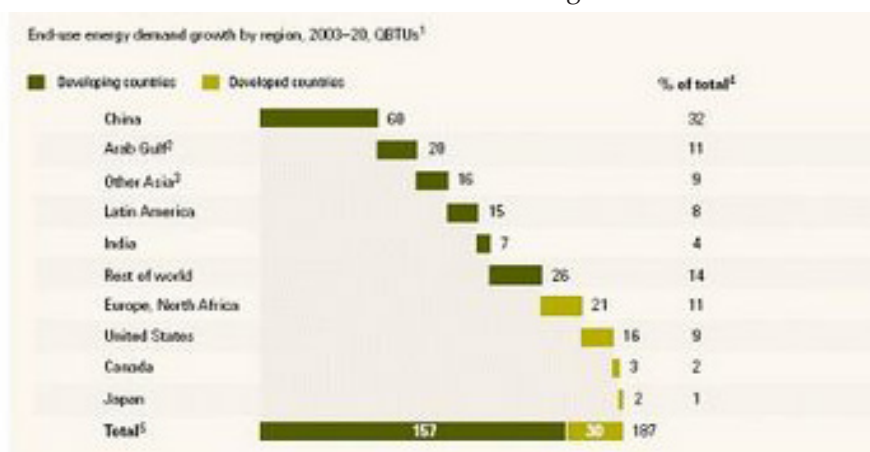
Kerjasama Selatan-Selatan lebih mengadopsi pemikiran jalan tengah yang dalam banyak aspek inheren dengan sosialisme demokrasi. Hal tersebut dapat kita lihat melalui contoh KTT BRIC yang semenjak melalukan kesepakatan dagang sejak tahun 2010 mengalami perkembangan yang pesat, meskipun antar anggotanya memiliki pengalaman konflikual. Selain itu, kita bisa melihat bagaimana organisasi regional lain seperti Mercosur, Uni Eropa, dan ASEAN juga melakukan kerjasama ekonomi yang intens tanpa menafikan perbedaan kultural diantara mereka. Meskipun berada dalam kondisi ekse neoliberalisme, globalisasi pasca krisis global 2008 tidak malah berhenti, justru semakin meningkat sekalipun ruang lingkup lebih partikular, yakni dalam skala regional. Beberapa organisasi regional masih menunjukkan adanya ancaman pasar bebas yang dapat mendistorsi arti penting kedaulatan, meskipun hal tersebut terjadi dalam skala regional.

Perekonomian global pasca-krisis 2008 seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi terintegrasinya kerjasama ekonomi sesama negara Timur-Tengah. Namun negara Liga Arab justru terpikat untuk menjalin kerjasama *outward looking* dengan sesama negara Selatan, terutama BRIC. Fakta memperlihatkan bahwa Liga Arab pasca krisis 2008 justru memainkan hubungan yang lebih

eksklusif dengan negara BRIC. Semisal kerjasama Liga Arab-Cina menunjukkan bahwa perdagangan antara kedua belah pihak membumbung naik dari \$ 36.4 bn di tahun 2004 menjadi \$ 145.4 bn pada tahun 2010, dan investasi reksa naik dari \$ 5.5 bn menjadi \$ 13.5 bn selama periode yang sama. Biaya proyek antara Cina dan negara-negara Arab melompat mengejutkan mengantungi tujuh puluh proyek tahun 2010 dari pada tahun 2004. Dalam dekade terakhir, perdagangan antara Cina dan Liga Arab telah berkembang sepuluh kali lipat menjadi US\$100 miliar dan diprediksi ke depan untuk sepuluh kali lipat kenaikan lagi pada dekade berikutnya. (www.thepeninsulaqatar.com, 4 september 2012).

Ekspansi China dalam industrilisasi manufaktur yang barang tentu membutuhkan banyak minyak menjadi obyek kerjasama yang menarik bagi negara Timur Tengah penghasil minyak. Seperti kita ketahui, negara Afrika Utara hingga kini dijadikan Cina sebagai basis pasokan sumber daya minyak yang sangat penting bagi sustainabilitas manufaktur Cina yang hingga sekarang masih belum menggunakan teknologi ramah lingkungan. Melalui penempatan industri minyaknya, Cina telah menjadikan Timur-Tengah sebagai wilayah prioritas. Oleh karena itulah, krisis yang terjadi di wilayah ini sangat berdampak pada manufaktur Cina. Implikasinya barang Cina yang selama ini kompetitif terancam mengalami kenaikan. Jika melihat komoditas yang diperdagangkan, terlihat adanya hubungan komplementer antar keduanya karena Cina memiliki kebutuhan sumber daya minyak yang tinggi sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Pertumbuhan Konsumsi Energi Dunia



Sumber: The Peninsula, 4 September 2012.

Selain Cina, Rusia juga merupakan negara BRIC lainnya yang mewarnai proses kerjasama ekonomi Liga Arab dengan aktor eksternal. Rusia dengan kebesaran Gasprom menunjukkan adanya cadangan gas potensial, sedangkan Liga Arab adalah penghasil minyak. Pada kunjungan tanggal 2 april 2009 telah ditandatangani mega proyek di bidang minyak dan gas mencapai nilai 25 miliar dolar AS oleh Pangeran Abdullah dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dengan adanya kombinasi energi tersebut, maka kerjasama antara negara Liga Arab dan Rusia akan komplemen. Kerjasama yang berkaitan dengan energi merupakan ikhwal penting bagi negara Liga Arab karena Rusia memiliki cadangan gas terbesar, dan gas merupakan prospek energi masa depan ketika minyak telah menjadi langka. Sebaliknya, Rusia hingga kini masih membutuhkan pasokan minyak bumi untuk mempercepat sektor manufakturnya.

Kerjasama dengan negara BRICs membuat negara Liga Arab lebih terfokus untuk ke luar ketimbang memperkuat integrasi ke dalam. Sebuah pengalaman regionalisme yang mirip dengan ASEAN yang begitu optimis ARF dapat memperkuat integrasi dalam tubuh ASEAN, namun justru muncul dugaan semakin banyak kekuatan eksternal yang mengintervensi didalamnya. Hubungan dengan negara BRICs dilakukan secara bi-multilateral dan tidak membawa nama institusi Liga Arab. Sekalipun strategi *outward looking* ini menguntungkan dalam konteks ekonomi, namun ternyata malah menciptakan stagnasi dalam legitimasi politik.

Kesimpulan

Gelora *Arab Spring* yang terjadi sebatas merubah perpolitikan Timur-Tengah dalam ruang lingkup nasional, belum merasuk pada konteks regional. Proses pergantian rezim yang sedang berada pada masa transisi nyatanya belum sepenuhnya mendorong Liga Arab untuk lebih terintegrasi. Hal tersebut karena problem politik timur-tengah sejatinya bukan semata hanya terletak pada siapa yang menjadi pemimpin negaranya. Siapapun pemimpin negaranya ketika masih menyimpan antipati terhadap perbedaan kultural dan ideologi, maka ambivalensi identitas kolektif masih akan menghambat proses integrasi dan institusionalisasi Liga Arab.

Ketika Liga Arab dituntut untuk semakin terintegrasi kedalam, justru negara timur tengah sedang mengikuti tren regionalisme kontemporer yang cenderung menafikan batas-batas geografis dan kultural demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Liga Arab pasca terjadinya krisis global 2008 justru aktif mengedepankan kerjasama ekonomi antar sesama negara Selatan dengan Cina, Rusia ketimbang melaksanakan kooperasi dengan sesama negara anggota Liga Arab. Implikasinya sikap Negara Liga Arab untuk memperluas pergaulan dengan dengan entitas di luar regional mereka justru

memperlemah pergaulan yang akan mempereratkan mereka secara internal, padahal problem utama Liga Arab, yakni identitas kolektif dapat teratasi dengan memulai kerjasama sesama anggota. Terlebih tuntutan rakyat paska gelombang demokrasi tersebut menitikberatkan pada problem ekonomi. ●

Daftar Pustaka

- Arnsperger, C. 2008. *Critical Political Economy: Complexity, Rationality and The Logic of Post-Orthodox Pluralism*. London: Routledge.
- Coronol, F. 2001. *Toward a Critique of Globalcentrism: Speculations on Capitalism's Nature*. dalam Comaroff, Jean ed. "Millennial Capitalism and Culture of Neoliberalisme", London: Duke University Press, 2001.
- Danreuther.R. 2007. *International Security: The Contemporary Agenda*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity press.
- Hayek, F. 2004. *The Road of Serfdom*. Chicago University Press.
- Hudson. V. 1997. *Culture and Foreign Polic*". Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Hurrel, Andrew. 2007, *Regionalism in Theoretical Perspectives*. London: Verso.
- Jackson, R., & Sorensen, R. 2008. *Global Political Economy*. Oxford University Press.
- Keohane, R. O. and Nye , J. S. 2005. *Power and Interdependence, World Politics in Transition*. Boston: Little Brown.
- Kohlberg, E. 1998. "Imam and Community in Pre Ghaybee Period" dalam Amir Arjomand (ed.) *Authority and Political Culture in Shiism*. Albany: State University of New York Press.
- Neack. L. 2008. *"The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era. 2nded"*. Plymouth :Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
- Onuf, N. 2002. "Institution, Intention, and International Relation", *Review of International Studies*, Vol. 28.
- Stiglitz. J. 2009. *Freefall: America, Free Market and the Sinking of Global Economy*. New York: Norton Company.
- Wendt, A. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Wendt, A. 1987. "The Agent -Structure Problem in International Relation Theory", *International Organization*. Vol.41, No.3. Pp.23-56

Sumber internet:

"GCC Kembali kirim Pejabat Resmi ke Yaman", *VOA news*, 3 Mei 2011, dalam <http://www.voanews.com/indonesian/news/GCC-Kembali-Kirim-Pejabat-Resmi-ke-Yaman-121075549.html>, diakses 2 September 2012.

- Internet World Stats, "Top 20 Internet Countries" dalam <http://www.internetworldstats.com/top20.htm>, diakses 13 September 2012.
- "Liga Arab Peringatkan Pemimpin Arab", *BBC Indonesia*, 19 Januari 2011, dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/01/110119_arableagueontunisiaupheaval.shtml, diakses 2 September 2012.
- "Menlu Mesir Jadi Sekjen Baru Liga Arab", *Indonesia Archipelago National Network (IANN)*, 16 Mei 2011, dalam <http://www.iannnews.com/news.php?kat=6&bid=2946>, diakses 4 September 2012.
- Panuhuk, Hendra. "Sikap Negara Teluk Terhadap Revolusi Timur Tengah", *Deutch Welle*, 20 April 2011, dalam <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15011390,00.html>, diakses 3 Mei 2012.
- Salehi, Djavad. "Iran's Economy: Short Term Performance and Long Term Potential", *Middle East Youth Inisiative*, 23 Mei 2008, dalam <http://www.shababinclusion.org/content/article/detail/1027>, diakses 4 September 2012.
- Sanaullah, "China Backs Political, Economic Reforms in Arab World", *The Peninsula*, 22 Mei 2011, dalam <http://www.thepeninsulaqatar.com/qatar/153215-china-backs-political-economic-reform>, diakses 4 September 2012.
- Weitz, Richard. "Evaluating the Proposed Saudi Arabian Arms Deal", 4 Agustus 2011, dalam <http://www.sldinfo.com/?p=12421>, diakses 2 September 2012.